

## Kejagung Akui Polri Pernah Kirim SPDP Kasus Penembakan 6 Laskar FPI

JAKARTA (IM) - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengakui bahwa pihaknya pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI di KM 50, Jalan Tol Jakarta-Cikampek tahun lalu.

"Memang benar, ada SPDP yang disampaikan ke JAM Pidum pada tanggal 20 Desember 2020," kata Leonard, Jumat (5/3).

Namun, lanjut Leonard, sampai 30 hari setelah SPDP diterima tidak ada tindak lanjut pelimpahan berkas perkara tersebut. Sehingga, diterbitkan formulir permintaan perkembangan hasil penyelidikan atau P17.

Diterbitkannya P17 oleh Kejaksaan Agung untuk menanyakan perkembangan dari penyidikan perkara tersebut. "P17 dikirim pada tanggal 19 Januari 2021," kata Leonard.

Dengan telah dikirimkannya P17, maka kewenangan terhadap perkara tersebut

ada pada pihak penyidik kepolisian.

"Oleh karena itu, kewenangan ada pada pihak penyidik kepolisian," ujar Leonard.

Sebelumnya, Dirlidipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan keenam pengikut Rizieq yang tewas dalam penembakan itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Keenamnya diduga melanggar Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana Pengeroyokan terhadap aparat kepolisian.

Namun, Kamis (4/3), Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan penyidikan kasus dugaan penyerangan polisi oleh 6 laskar FPI dihentikan. Penghentian kasus tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.

"Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/3). ● han

## KPK Usut Pemilihan Khusus Vendor Bansos Covid-19

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengusut pemilihan vendor untuk pengerjaan proyek bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial.

Setidaknya sudah 2 saksi dari pihak swasta yakni Edwyn dan Imam yang diperiksa. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Menteri Sosial Juliani Peter Batubara dan kawan-kawan.

"Edwyn (Swasta) dan Imam (Swasta), didalam pengetahuannya terkait dugaan adanya beberapa perusahaan sebagai vendor yang khusus dipilih untuk turut mengerjakan proyek Bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kemensos RI," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/3).

Diketahui, dalam kasus ini pelaksanaan proyek bansos dilakukan dengan cara penunjukan langsung para

rekanan dan diduga disepakati ditandatangani oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos. Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliani Peter Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliani.

Kalau Rp8,8 miliar dijumlahkan dengan Rp8,2 miliar, maka jatah dugaan suap untuk Juliani sebesar Rp17 miliar. ● mei

IDN/ANTARA



### PEMERIKSAAN JULIANI P BATUBARA

Tersangka mantan Menteri Sosial Juliani P Batubara bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3). Juliani P Batubara diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka terkait korupsi dana paket Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19, untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

## KPK Panggil Istri Edhy Prabowo terkait Kasus Ekspor Benih Lobster

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Iis Rosita Dewi, istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Lis akan diminta keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Edhy terkait dugaan suap perizinan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3).

Selain istri Edhy, Ali menyebut, KPK juga memanggil 12 saksi lainnya yakni Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanaf, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda dan Direktur Utama PT Aero Citra Kargo Amri.

Kemudian, lanjut Ali, KPK juga memeriksa pensiunan PNS Mohammad Sadik, PNS KKP Rochmat M Rofiq, pegawai sipir Rah-

matullah, dan Staf Hukum Operasional BCA Randy Bagas Prasetya.

Selain itu, ada juga Notaris Lies Herminingsih, karyawan money changer Bintang Valas Abadi Aisyiah Paulina, karyawan swasta Mohamad Ridho, wiraswasta Ade Mulyana Saleh, dan mahasiswi Siti Maryam.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka sebagai penerima suap. Ketujuh tersangka tersebut yakni Edhy Prabowo, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (due diligence) Safri, Staf Khusus Edhy Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (due diligence) Andrea Misanta Pribadi.

Kemudian, Amirul Mukminin dari unsur swasta/ sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi, dan Ainul Faqih selaku staf istri Edhy.

Sementara itu, tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



### PELEPASAN SATGAS MARINE TASK FORCE

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memeriksa pasukan saat upacara pelepasan Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI Konga XXVIII-M/Unifil di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (5/3). Sebanyak 119 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI Konga XXVIII-M/Unifil bersama KRI Sultan Iskandar Muda-367 diberangkatkan menuju Lebanon dalam menjalankan misi perdamaian PBB.

## Kubu AHY Tuding Eks Kader Demokrat Bergerak atas Dorongan Politik Uang

Kubu AHY mengatakan, peserta KLB Demokrat di Deliserdang yang diklaim sudah 1.200 orang, bukanlah pemilik suara sah. Mereka ditawarkan insentif *money politics*.

JAKARTA (IM) - Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) melalui Konres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara. KLB tersebut diklaim akan dihadiri 1.200 orang.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, KLB tersebut bodong.

Bahkan, penurunan para kader dan pemilik suara sah diancam karena menolak hadir.

Aksi GPK-PD merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum Partai Demokrat dari Ketua Umum Partai Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020.

"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif *money politics* (politik uang), jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir," ujarnya, Jumat (5/3).

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dalam mewujudkan ambisi jahatnya, para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebarkan kabar bohong, seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung, seakan-akan ada pejabat penting DPP yang mendukung.

"Pola ini sejak awal mereka terapkan ketika mencatut nama

Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Pada hal itu, kata Herzaky, kenyataannya, yang hadir di KLB itu bukanlah pemilik suara. Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, atau provinsi tertentu.

Selain itu, sambung dia, Panitia pelaksana Kongres pun yang diketahui dipimpin oleh mantan kader yang diberhentikan tetap dengan tidak hormat, sama sekali tidak berhak me-

minta, mengusulkan, apalagi melaksanakan Kongres Luar Biasa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenhukham berdasarkan Kongres yang sah di tahun 2020.

"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif *money politics* asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili kab/kota/provinsi itu," tegasnya. ● han

## Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu upaya pemulihan ekonomi di dalam negeri yang terpuruk akibat Covid-19 yakni dengan vaksinasi.

Menurut Ma'ruf, vaksinasi merupakan salah satu hal utama dalam penanganan pandemi.

"Yang penting adalah penanganan Covid-19, terutama melalui vaksinasi," kata Ma'ruf dalam sebuah wawancara, Kamis (4/3).

Ma'ruf mengatakan, vaksinasi diharapkan menjadi tameng dalam menghalau penyebaran Covid-19. Oleh

karena itu, pemerintah menargetkan dalam satu tahun ini pelaksanaan vaksinasi dapat selesai.

Menurut Ma'ruf, dari segi penanganan protokol kesehatan dan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), sudah terlihat ada penurunan kasus Covid-19. "Oleh karena itu kami akan terus intensifikasi vaksinasi sehingga bisa selesai tahun ini," katanya.

Selain vaksinasi, intensif, rangsangan, dan stimulan untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah juga perlu didukung dengan kepercayaan dari seluruh pihak. ● han

## Satgas Covid-19 Sidak ke Lokasi KLB Partai Demokrat di Deliserdang

DELISERDANG (IM) - Satgas Covid-19 Sumatera Utara melakukan inspeksi ke lokasi Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di The Hill Resort, Sibolangi, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Tim Satgas Covid-19 yang dipimpin Wakil Ketua Satgas Covid-19 Sumut, Kolonel (INF) Azhar Mulyadi, tiba sekitar pukul 11:00 WIB dan langsung masuk ke aula yang menjadi areal utama KLB. Dia terlihat didampingi salah seorang panita KLB.

Tidak ada keterangan dari Kolonel Azhar terkait inspeksinya tersebut. Aula yang

menjadi lokasi utama kongres juga ditutup setelah Kolonel Azhar masuk ke ruangan tersebut. Termasuk terkait ada tidaknya izin pelaksanaan KLB tersebut dari Satgas Covid-19.

Namun anggota majelis tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, saat memberikan keterangan kepada wartawan, mengaku pihaknya telah mengantongi izin atas pelaksanaan KLB tersebut. "Kita sudah memenuhi semua ketentuan terkait pelaksanaan KLB ini. Bukti ini satgas Covid-19 datang memeriksa lokasi. Kalau tidak ada izin mana mungkin mereka memeriksa kami," tukasnya. ● mei

## Mahfud MD: Karhutla Turun 81% di 2020

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan tahun 2020 kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun sebesar 81%. Di mana pada 2019 terjadi karhutla 1.649.258 hektare. Sedangkan 2020 hingga sekarang tinggal 296.942 hektar.

"Di tahun 2020 ini, Alhamdulillah Karhutla itu turun sebesar 81%, turun sebesar 81% dari yang terjadi pada tahun 2019 itu 1.649.258 hektare, pada tahun ini tinggal 296.942 hektare saja, sudah sangat jauh," ungkap Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2021 secara virtual, Jumat (5/3).

Mahfud pun meminta semua pihak berkomitmen agar menjaga situasi ini.

"Di sini mari kita jaga situasi ini, karena pemerintah sudah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud kehadiran negara," tegasnya.

Presiden sebelumnya telah

mengeluarkan instruksi lewat Inpres 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

"Jadi, pedoman kebijakan sekarang Inpres 3 Tahun 2020. Tapi sebenarnya ini sudah dimulai tahun 2015, pada waktu itu juga Presiden mengeluarkan Inpres khusus. Tapi yang sekarang kita bicarakan Inpres 3 Tahun 2020," tuturnya.

"Di mana, di dalam Inpres tersebut, Presiden memerintahkan kepada kita semua yang ditunjuk di dalam Inpres ini jabatan yang pejabatnya ditunjuk Presiden untuk satu melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan seluruh wilayah Indonesia," kata Mahfud.

Inpres tersebut meliputi kegiatan pencegahan terjadinya karhutla.

"Kemarin Presiden juga menekankan lagi dicegah. Sekecil apapun, begitu muncul segera diselesaikan sebelum meluas. Sebelum muncul dicegah jika ada tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran. Jadi yang terpenting itu adalah pencegahan," tegasnya. ● han

IDN/ANTARA



### BARANG BUKTI PERBURUAN GAJAH SUMATERA

Seorang petugas menunjukkan tengkorak dan sepasang gading Gajah Sumatera liar di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Kota Pekanbaru, Jumat (5/3). BBKSDA Riau menerima gading dan tengkorak gajah Sumatera dari pihak Kejaksaan pada akhir Februari lalu yang merupakan barang bukti kasus perburuan satwa dilindungi di Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu setelah vonis dijatuhkan terhadap dua pelaku pembunuh gajah tersebut dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidi enam bulan kurungan.